

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YASRUDDIN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 897321

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 790.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 550 m2/220 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, WARISAN Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 12500 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 12500 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/400 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 131.000.000

1. MOBIL, TOYOTA B401RA-GMZFJ (CALYA) Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA SPD. MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, YAMAHA YAMAHA 2DP-R A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOTOR, HONDA F1C02N28L0 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 30.850.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 26.599.399

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 978.449.399



III. HUTANG

Rp. 15.857.386

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 962.592.013

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.